

Kajian

KETIMPANGAN PARIWISATA WILAYAH PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TENGAH

2012-2022



Kajian

**KETIMPANGAN PARIWISATA
WILAYAH PEMBANGUNAN**

PROVINSI JAWA TENGAH

2012-2022

<https://jateng.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

KAJIAN KETIMPANGAN PARIWISATA WILAYAH PEMBANGUNAN

PROVINSI JAWA TENGAH 2012 - 2022

No. Publikasi : **33000.23100**

Katalog : 8401024.33

Ukuran Buku : B5-JIS

Jumlah Halaman : xii + 44 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Diterbitkan oleh:

@Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dicetak oleh :

CV. Surya Lestari

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

ANGGOTA TIM PENYUSUN :

Pengarah : Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si

Penanggung Jawab : Didik Nursetyohadi, M.Agb.

Penyunting : Didik Nursetyohadi, M.Agb.

A'idzin, SE, M.A, M.Eng

Naskah : Hayu Wuranti, S.Si

Penyusun : Hayu Wuranti, S.Si

Design Tata Letak : Joko Mulyono

<https://jateng.lps.go.id>

KATA PENGANTAR

Dalam upaya mewujudkan pembangunan Jawa Tengah yang lebih menekankan pada karakter dan potensi wilayah serta memperlihatkan keberagaman, maka dikembangkan 8 (delapan) wilayah pengembangan utama. Pengelompokan kewilayahan tersebut bertujuan untuk dapat lebih mengoptimalkan potensi lokal, mempertahankan keberagaman hasil produk serta menciptakan pemerataan pembangunan yang memiliki ciri kuat produk unggulan, termasuk sektor pariwisata. Perkembangan sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi sektor kunci bagi perkembangan sektor lainnya di Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan publikasi Kajian Ketimpangan Pariwisata Wilayah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, 2012-2022 bertujuan untuk mengetahui wilayah pembangunan mana yang sektor pariwisatanya menjadi basis (unggulan) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022, untuk wilayah pembangunan mana yang sektor pariwisatanya menjadi basis (unggulan) di Provinsi Jawa Tengah pada masa yang akan datang, dan untuk mengetahui persebaran wilayah pembangunan berdasarkan potensi pariwisata di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022.

Publikasi ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi yang berguna untuk berbagai tujuan dan memberikan informasi berharga bagi para pengguna data BPS, baik dari kalangan pemerintah maupun publik.

Saran dan kritik perbaikan sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi sejenis pada masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih.

Semarang, Desember 2023
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Tengah



Dadang Hardiwan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Ringkasan Eksekutif	xiii
Bab I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan dan manfaat Penelitian	6
Bab II Konsep dan Metode Perhitungan	
2.1. Kontribusi Ekonomi Pariwisata.....	7
2.2. Teori Komponen Pertumbuhan Ekonomi Wilayah	8
2.3. Metode Analisis.....	9
Bab III Perkembangan Pariwisata Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah	
3.1. Potensi Pariwisata menurut Wilayah Pembangunan	21
3.2. Kontribusi dan Pertumbuhan Wisata Wilayah Pembangunan	26
Bab IV Ketimpangan Pariwisata Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah	
4.1. Kategori LQ	29
4.2. Pemetaan Wilayah menurut Kategori LQ	31

4.3.	Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ)	33
4.4.	Analisis Gabungan LQ Dan DLQ	35
4.5.	Analisis Shift Share	36
4.6.	Analisis Overlay	38
Bab V	Kesimpulan	41
	Daftar Pustaka	43

<https://jateng.bps.go.id>



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Matriks Perubahan LQ	12
Tabel 2.2.	Diagram Pemetaan Wilayah Menurut Kategori LQ	13
Tabel 2.3.	Analisis Shift Share Esteban Marquillas	19

<https://jateng.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Sebaran Daya Tarik Wisata menurut Wilayah Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah 2022	21
Gambar 3.2.	Sebaran Pengunjung Daya Tarik Wisata dan Event menurut Wilayah Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah 2022	22
Gambar 3.3.	Sebaran Hotel dan Jasa Akomodasi Lainnya menurut Wilayah Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah 2022	24
Gambar 3.4.	Sebaran Restoran/Rumah Makan menurut Wilayah Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah 2021	25
Gambar 3.5.	Pertumbuhan Sektor Pariwisata menurut Wilayah Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah 2012-2022	27
Gambar 3.6.	Peranan Sektor Pariwisata Wilayah Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah 2022	28
Gambar 3.7.	Peranan Sektor Pariwisata Wilayah Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah 2012	29
Gambar 4.1.	Sebaran Sektor Unggulan Industri Pariwisata Wilayah Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2022	38
Gambar 4.2.	Sebaran wilayah menurut Diagram Pemetaan Wilayah Kategori LQ Sektor Pariwisata Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah, Tahun 2012-2022	41
Gambar 4.3.	Sebaran wilayah menurut Dynamic Location Quotient (DLQ) Sektor Pariwisata Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah, Tahun 2012-2022	43

Gambar 4.4.	Sebaran wilayah menurut Analisis Gabungan Location Quotient (LQ) Dan Dynamic Location Quotient (DLQ) Sektor Pariwisata Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah, Tahun 2012-2022	44
Gambar 4.5.	Sebaran wilayah menurut Analisis Shift Share Sektor Pariwisata Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah, Tahun 2012-2022	46
Gambar 4.6.	Sebaran wilayah menurut Analisis Overlay Sektor Pariwisata Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah, Tahun 2012-2022	48

<https://jateng.bps.go.id>



RINGKASAN EKSEKUTIF

Jawa Tengah dengan potensi pengembangan pariwisata yang sangat besar ternyata sebaran daya Tarik wisata di wilayah pembangunan sangat bervariasi. Demikian juga dengan hotel dan restoran yang merupakan salah satu faktor penunjang utama kegiatan pariwisata menyebar secara tidak merata di wilayah pembangunan. Hal ini menyebabkan potensi pariwisata di wilayah pembangunan masih belum dapat digali secara optimal, sehingga terjadi ketimpangan sektor pariwisata antar wilayah pembangunan di Jawa Tengah.

Potensi dan kondisi sektor pariwisata yang berbeda menyebabkan terjadinya pola pertumbuhan ekonomi yang tak seimbang antar regional. Kompetisi sektor pariwisata antar wilayah memiliki implikasi pada munculnya disparitas antar wilayah. Di satu sisi, terdapat wilayah yang mampu berkembang lebih cepat karena menjadi tujuan pengembangan pariwisata. Di sisi lain, terdapat wilayah yang makin tertinggal karena tidak memiliki daya tarik pariwisata.

Sebagian besar wilayah pembangunan di Jawa Tengah memiliki sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan atau basis. Namun demikian, pembangunan sektor pariwisata pada wilayah pembangunan dengan sektor pariwisata non unggulan tidak boleh dilupakan. Sementara itu hasil analisis pemetaan kategori LQ menunjukkan sebagian besar wilayah pembangunan di Jawa Tengah memerlukan perhatian lebih khusus karena terjadi penurunan LQ. Kondisi ini mencerminkan menurunnya potensi relatif daerah pada sektor pariwisata. Meskipun terjadi penurunan potensi sektor pariwisata, namun sektor pariwisata sebagian besar wilayah pembangunan di Jawa Tengah tidak mengalami perubahan posisi sehingga kedepan sektor pariwisata masih tetap menjadi sektor basis yang dapat diunggulkan dan mempunyai daya saing yang tinggi dibandingkan sektor pariwisata terhadap Jawa Tengah. Pertumbuhan sektor pariwisata pada sebagian besar wilayah pembangunan di Jawa Tengah termasuk dalam kelompok yang progresif (maju) meskipun tidak memiliki keunggulan kompetitif.

INFOGRAFIS

SHARE PDRB SEKTOR PARIWISATA
ATAS DASAR HARGA BERLAKU
MENURUT WILAYAH PEMBANGUNAN

TAHUN 2022



BREGASMALANG

12,20

PETANGLONG

5,51

WANARAKUTI

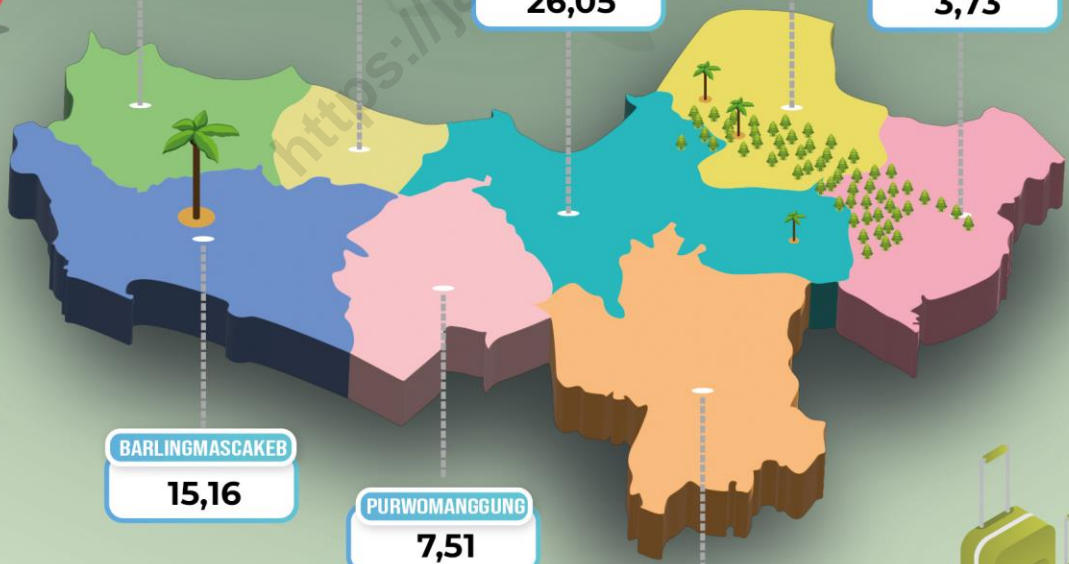
8,42

KEDUNGSAPUR

26,05

BANGLOR

3,73



BARLINGMASCABE

15,16

PURWOMANGGUNG

7,51

SUBOSUKAWONOSRATEN

21,91



1.1. Latar Belakang

Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu permasalahan yang pasti timbul dalam pembangunan, walaupun pada dasarnya ketimpangan ekonomi adalah inherent dengan proses pembangunan itu sendiri (Hasan, Azis, 2018). Ketimpangan ekonomi merupakan fenomena umum yang terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan antar daerah dalam output per kapita dan pendapatan di Cina besar dan terus menerus (Chen, 2010). Ketimpangan ekonomi di suatu daerah akan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti peningkatan migrasi dari daerah yang miskin ke daerah yang lebih maju, kriminalitas, dan konflik antar masyarakat. Dalam konteks kenegaraan ketimpangan akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang kemudian akan mengancam keutuhan suatu negara.

Ketimpangan Pembangunan Wilayah adalah salah satu permasalahan ekonomi regional yang masih menjadi isu yang hangat. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah ini salah satu disebabkan masih terkonsentrasinya proses pembangunan ekonomi di Jawa Tengah. Sementara kondisi itu terjadi, daerah-daerah yang dianggap pembangunan masih kurang terus berusaha mengejar ketertinggalan pembangunan di wilayahnya dengan berbagai strategi pembangunan.

Pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berdaya saing berbasis industri, dan pariwisata, dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Perkembangan sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi sektor kunci bagi perkembangan sektor lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Peranan sektor pariwisata semakin penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang

diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Tengah.

Dalam mewujudkan hal tersebut, maka perlu di ketahui terlebih dahulu, pentingnya suatu daerah menghitung peran sektor pariwisata di wilayah tersebut, agar sektor ini bisa menjadi penopang perekonomian bagi suatu daerah. Kondisi yang berbeda menyebabkan terjadinya pola pertumbuhan sektor pariwisata yang tak seimbang antar regional. Kondisi ini selaras dengan teori awal pembangunan ekonomi mengenai pertumbuhan tak seimbang. Potensi suatu wilayah dipandang memberikan manfaat ekonomi yang lebih tinggi dari pada wilayah lainnya. Pembangunan ekonomi yang dijalankan lebih menitikberatkan pada wilayah yang potensial tersebut. Ketidakseimbangan pola pembangunan ini juga disebabkan sumber daya investasi yang terbatas.

Kompetisi antar wilayah memiliki implikasi pada munculnya disparitas antar wilayah. Di satu sisi, terdapat wilayah yang mampu berkembang lebih cepat karena menjadi tujuan lokasi usaha. Di sisi lain, terdapat wilayah yang makin tertinggal karena tidak memiliki daya tarik bagi akumulasi bisnis. Dalam teorinya mengenai penyebab akumulasi perekonomian, Myrdal menyatakan bahwa aglomerasi dan polarisasi pada pusat-pusat pertumbuhan dan wilayah-wilayah tertentu merupakan hal yang alamiah. Proses ekspansi itu akan berakumulasi. Myrdal menekankan pentingnya menghilangkan batas-batas area untuk mengurangi disparitas regional. Dengan meningkatkan daya tarik dan aktivitas ekonomi di satu daerah yang dapat menghilangkan batas area ini akan mengakibatkan difusi ekspansi kumulatif antar daerah (Higgins dan Savoie, 1995: 83-84).

Pembangunan wilayah bertujuan untuk meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta memajukan kehidupan masyarakat. Pembangunan wilayah yang strategis dan

berkualitas menjadi harapan setiap daerah di Indonesia. Pembangunan wilayah selain meningkatkan daya saing wilayah juga mengupayakan keseimbangan pembangunan antardaerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Perkembangan indikator utama dalam pembangunan wilayah meliputi pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan dapat menggambarkan capaian kinerja pembangunan wilayah secara umum.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan Jawa Tengah yang lebih menekankan pada karakter dan potensi wilayah serta memperlihatkan keberagaman, maka dikembangkan 8 (delapan) wilayah pengembangan utama. Pengelompokan kewilayahan tersebut bertujuan untuk dapat lebih mengoptimalkan potensi lokal, mempertahankan keberagaman hasil produk serta menciptakan pemerataan pembangunan yang memiliki ciri kuat produk unggulan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 yang tertuang pada Peratutran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019, pengembangan kewilayahan meliputi Barlingmascakeb, Purwomanggung, Subosukawonosraten, Banglor, Wanarakuti, Kedungsepur, Petanglong dan Bregasmalang.

Wilayah Pembangunan Barlingmascakeb meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen. Pengembangan Wilayah Pembangunan Purwomanggung meliputi Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung. Wilayah Pembangunan Subosukawonosraten meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Wilayah Pembangunan Banglor meliputi 2 (dua) kabupaten di perbatasan sebelah timur-utara Jawa Tengah dengan Jawa Timur yaitu Kabupaten Rembang dan Blora. Wilayah Pembangunan Wanarakuti (Juwana – Jepara – Kudus - Pati) meliputi Kabupaten Jepara, Kudus dan Pati. Wilayah Pembangunan Kedungsepur meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Ungaran (Kabupaten Semarang), Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Purwodadi (Kabupaten

Grobogan). Wilayah Pembangunan Petanglong meliputi Kabupaten Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan. Wilayah Pembangunan Bregasmalang meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Diharapkan dengan meningkatnya pendapatan daerah akan diikuti dengan besarnya kontribusi PDRB pariwisata terhadap seluruh kegiatan perekonomian dengan memperhatikan kondisi setiap daerah. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui wilayah pembangunan mana yang memiliki pariwisata potensial di Provinsi Jawa Tengah sehingga pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah menjadi lebih efektif dan efisien meningkatkan perekonomian. Berdasarkan rumusan masalah tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui wilayah pembangunan mana yang sektor pariwisatanya menjadi basis (unggulan) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022, untuk wilayah pembangunan mana yang sektor pariwisatanya menjadi basis (unggulan) di Provinsi Jawa Tengah pada masa yang akan datang, dan untuk mengetahui persebaran wilayah pembangunan berdasarkan potensi pariwisata di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022.

BAB. II

KONSEP DAN METODE PERHITUNGAN

2.1. Kontribusi Ekonomi Pariwisata

Dalam perhitungan kontribusi ekonomi dari sektor Perjalanan dan Pariwisata, terdapat beberapa komponen yang dapat diperhitungkan. Sebelumnya untuk membentuk metodologi di tingkat internasional yang dapat dikomparasikan, UNWTO menciptakan beberapa rekomendasi untuk statistik kepariwisataan mulai tahun 1978, 1993 dan 2008 dalam bentuk *International Recommendations on Tourism Statistics* (IRTS). Rekomendasi ini mencakup konsep dasar dan definisi mengenai berbagai aspek kepariwisataan seperti definisi pengunjung, jenis-jenis pariwisata, berbagai tujuan perjalanan wisata, dan konsep pengeluaran pariwisata. Konsep-konsep dan klasifikasi dalam IRTS ditujukan untuk menyamakan dasar analisis statistik sektor kepariwisataan.

Tourism Satellite Account (TSA: RMF 2008) merupakan rekomendasi internasional kedua setelah *International Recommendations for Tourism Statistics* 2008 untuk statistik pariwisata yang dikembangkan dalam kerangka pikir yang konsisten dengan Sistem Penghitungan Nasional. Kedua rekomendasi statistik tersebut konsisten dengan satu sama lain dan menyediakan kerangka berpikir konseptual untuk mengukur dan menganalisis pariwisata sebagai aktivitas ekonomi. Sebagai alat statistik untuk akuntansi ekonomi pariwisata, TSA dapat dilihat sebagai kumpulan ringkasan tabel yang merepresentasikan data pariwisata yang berbeda-beda mulai dari pengeluaran pariwisata *inbound*, pengeluaran pariwisata domestic dan pengeluaran pariwisata *outbound*, pengeluaran pariwisata internal, akun produksi dari industri pariwisata, Nilai Tambah Bruto (NTB) dan Produk Domestik Bruto (PDB) yang berasal dari permintaan pariwisata, ketenagakerjaan, investasi, konsumsi pemerintah, dan indikator *non-moneter*.

Sektor pariwisata dalam TSA termasuk kluster unit produksi dalam berbagai industri yang memberikan barang dan jasa konsumsi yang diminta oleh pengunjung. Sektor industri tersebut disebut sebagai industri pariwisata karena pengunjung mengkonsumsi bagian yang sangat besar dari persediaan industri tersebut di mana jika tidak ada pengunjung maka produksi dari industri tersebut akan berkurang secara signifikan.

2.2. Teori Komponen Pertumbuhan Wilayah

Tarigan (dalam Sanjaya, 2009) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi.

Untuk mengidentifikasi sumber atau komponen pertumbuhan wilayah, biasanya digunakan analisis shift share. Dalam hal ini, analisis shift share diartikan sebagai salah satu teknik kuantitatif yang biasa digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah relatif terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih tinggi sebagai pembanding atau referensi.

Untuk tujuan tersebut, analisis ini menggunakan tiga informasi dasar yang berhubungan satu sama lain yaitu:

Pertama, pertumbuhan ekonomi referensi propinsi atau nasional (*nasional growth effect*) yang menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap perekonomian daerah.

Kedua, pergeseran proporsional (*proportional shift*), yang menunjukkan perubahan relatif kinerja suatu sektor di daerah tertentu terhadap sektor yang sama di referensi propinsi atau nasional.

Ketiga, Pergeseran deferensial (*differential shift*) yang memberikan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan

perekonomian yang dijadikan referensi. Jika pergeseran suatu industri adalah positif, maka industri tersebut relatif lebih tinggi daya saingnya dibandingkan industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan referensi. Pergeseran deferensial ini disebut juga pengaruh keunggulan kompetitif (Sanjaya, 2009).

2.3. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi tingkat disparitas dan sektor unggulan. Sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk memperkuat dan melengkapi analisis kuantitatif.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Location Quotient (LQ), Pemetaan Wilayah menurut Kategori LQ, Dynamics Location Quotient (DLQ), Analisis Gabungan LQ dan DLQ, Shift Share serta Analisis Overlay.

A. Location Quotient (LQ)

Location quotient (LQ) digunakan untuk menentukan sektor basis dan non basis, dengan tujuan untuk melihat keunggulan komparatif suatu daerah dalam menentukan sektor andalannya. Sektor basis adalah sektor ekonomi yang mampu untuk memenuhi kebutuhan baik pasar domestik daerah itu sendiri maupun pasar luar. Artinya sektor ini dalam aktivitasnya mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri maupun daerah lain dan dapat dijadikan sektor unggulan. Sedangkan sektor non basis merupakan sektor ekonomi yang hanya mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri.

Sektor basis menghasilkan barang dan jasa yang dapat dijual keluar daerah sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah tersebut dan secara berantai akan meningkatkan investasi baru dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, peningkatan pendapatan tersebut juga akan meningkatkan permintaan produk

barang/jasa baik dari sektor basis maupun sektor non basis. Dengan dasar ini maka sektor basis perlu diprioritaskan untuk dikembangkan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Jika koefisien LQ suatu sektor ≥ 1 berarti sektor tersebut mempunyai potensi atau termasuk sektor basis. Sektor tersebut memiliki spesialisasi dan terkonsentrasi di daerah tersebut. Jika koefisien LQ suatu sektor < 1 berarti sektor tersebut kurang mempunyai potensi atau bukan termasuk sektor basis. Sektor tersebut tidak berspesialisasi dan tidak terkonsentrasi di daerah tersebut. Jika koefisien LQ = 1 berarti tingkat spesialisasi sektor tersebut sama dengan daerah tingkat atasnya. Rumus LQ adalah:

$$LQ = \frac{Y_i/S_i}{Y_n/S_n}$$

Dimana:

LQ = Indeks *Location Quotient*

Y_i = PDRB Sektor Pariwisata Kabupaten/Kota

S_i = Total PDRB Kabupaten/Kota

Y_n = PDRB Sektor Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

S_n = Total PDRB Provinsi Jawa Tengah

Untuk menghitung LQ sektor pariwisata kabupaten/kota dapat dilakukan dengan mensubstitusi angka PDRB Provinsi Jawa Tengah dengan angka PDRB Kabupaten/Kota dan angka PDRB Provinsi Jawa Tengah dengan angka PDRB Kabupaten/Kota.

B. Pemetaan Wilayah menurut Kategori LQ

Formula LQ tersebut bersifat statis atau *Static Location Quotients* (SLQ) karena hanya melihat satu periode atau titik waktu saja. Model ini lemah karena tidak mampu melihat perubahan spesialisasi secara periodik. Model tidak dapat melihat apakah suatu sektor yang unggul pada tahun $t-n$ masih tetap menjadi sektor unggulan pada tahun t . Demikian pula, model tidak mengakomodasi jika sektor yang belum unggul pada saat ini akan menjadi sektor unggulan di masa yang akan datang. Pada analisis ini, nilai SLQ yang dipergunakan adalah rata-rata SLQ dari setiap SLQ yang dihasilkan pada setiap periode tahun penelitian.

Alternatif lain dari SLQ adalah model LQ yang dikembangkan oleh Bank Dunia. Cara lain untuk menggunakan LQ dalam pengambilan keputusan ekonomi regional adalah dengan melihat bagaimana nilai LQ berubah sepanjang tahun (dinamis). Nilai dari perubahan LQ ini menyediakan informasi yang bernilai apakah suatu subsektor ekonomi suatu daerah meningkat atau turun konsentrasinya secara relatif terhadap daerah lain. Untuk menghasilkan nilai perubahan LQ tersebut, Dinc (2002) menggunakan formula sebagai berikut:

$$\Delta LQ = \frac{LQ_{t+n} - LQ_t}{LQ_t}$$

Dinc (2002) menyatakan bahwa dari hasil ΔLQ tersebut, subsektor ekonomi dapat dikategorikan menjadi 4 kategori. Pada matriks di bawah ini, nilai ΔLQ pada tahun terakhir mungkin akan besar dan terdapat kecenderungan meningkat, dimana hal ini merupakan situasi yang diharapkan (sel B). Jika nilai ΔLQ dapat besar tetapi mengalami penurunan sepanjang waktu, maka pengambil kebijakan perlu memberikan perhatian pada sektor ini (sel A). LQ dapat pula kecil dan meningkat atau menurun sepanjang waktu.

Tabel 2.1. Matriks Perubahan LQ

		Perubahan LQ	
		Menurun	Meningkat
Nilai LQ	Tinggi	A	B
	Rendah	C	D

Sumber: Dinc (2002)

Hasil penentuan kategori ini memberikan alat analisis yang penting bagi pengambilan kebijakan ekonomi karena setiap kategori akan memerlukan pendekatan pembangunan ekonomi yang berbeda. Sebagai misal, suatu daerah akan berfokus pada sektor ekonomi yang memiliki LQ tinggi. Jika nilai LQ sektor tersebut mengalami penurunan, maka akan berdampak menciptakan potensi masalah pembangunan ekonomi daerah. Demikian pula, jika LQ suatu sub sektor relatif kecil tetapi menunjukkan adanya pertumbuhan, maka sektor ini perlu mendapat perhatian khusus. Jika suatu sektor ekonomi memperlihatkan penurunan LQ, maka pemerintah daerah perlu mencari penyebabnya dan membuat program kebijakan yang dapat menghentikan penurunan LQ sektor tersebut atau paling tidak memperlambatnya.

Hasil indeks LQ dalam analisis ini dipergunakan sebagai cerminan potensi lebih dari suatu daerah secara relatif terhadap daerah lainnya. Pemetaan potensi pariwisata di Jawa Tengah dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori:

1. Wilayah yang memiliki tingkat persaingan yang rendah dan sekaligus kurang memiliki potensi untuk bersaing dengan daerah lain dalam sektor pariwisata. Daerah dengan klasifikasi ini dalam analisis LQ dikategorikan sebagai daerah dengan SLQ rendah dan Δ LQ rendah.
2. Wilayah yang memiliki tingkat persaingan tinggi tetapi kurang memiliki potensi untuk bersaing dengan daerah lain dalam sektor pariwisata atau potensi

bersaingnya mengalami penurunan. Daerah dengan klasifikasi ini dalam analisis LQ dikategorikan sebagai daerah dengan SLQ tinggi dan ΔLQ rendah

3. Wilayah yang memiliki tingkat persaingan rendah tetapi terhitung memiliki potensi yang kemampuan cukup untuk bersaing dengan daerah lain dalam sektor pariwisata. Daerah dengan klasifikasi ini dalam analisis LQ dikategorikan sebagai daerah dengan SLQ rendah dan ΔLQ tinggi.
4. Wilayah yang memiliki tingkat persaingan tinggi dan sekaligus memiliki potensi yang kemampuan cukup untuk bersaing dengan daerah lain dalam sektor pariwisata. Daerah ini dapat merupakan daerah percontohan sektor pariwisata. Daerah dengan klasifikasi ini dalam analisis LQ dikategorikan sebagai daerah dengan SLQ tinggi dan ΔLQ tinggi.

Peta daerah dengan 4 klasifikasi tersebut digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Diagram Pemetaan Wilayah Menurut Kategori LQ

ΔLQ	$SLQ < 1 ; \Delta LQ > 0$	$SLQ > 1 ; \Delta LQ > 0$
	$SLQ < 1 ; \Delta LQ < 0$	$SLQ > 1 ; \Delta LQ < 0$
SLQ		

Sumber: Dinc (2002), modifikasi

C. Dynamics Location Quotient (DLQ)

Dynamic Location Quotient (DLQ) adalah modifikasi dari LQ dengan mengakomodasi faktor laju pertumbuhan keluaran sektor ekonomi dari waktu ke waktu. Karena nilai LQ tidak dapat digunakan untuk memprediksi basis dan non

basisnya suatu sektor pada masa yang akan datang. Nilai DLQ dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Nugroho,2010):

$$DLQ = \left\{ \frac{(1 + g_{in})/(1 + g_n)}{(1 + G_i)/(1 + G_n)} \right\}^t$$

Keterangan :

g_{in} = rata-rata laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata di Kabupaten/Kota

g_n = rata-rata laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten/Kota

G_i = rata-rata laju pertumbuhan sektor/ sub sektor pariwisata di Provinsi

G_n = rata-rata laju pertumbuhan PDRB total Provinsi

t = tahun penelitian

Kriteria :

- a. $DLQ > 1$, berarti potensi perkembangan sektor/sub sektor pariwisata di daerah lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di daerah referensi.
- b. $DLQ < 1$, berarti potensi perkembangan sektor/sub sektor pariwisata di daerah lebih lambat dibandingkan sektor yang sama di daerah referensi.
- c. $DLQ = 1$, berarti potensi perkembangan sektor/sub sektor pariwisata di daerah sama dengan sektor yang sma di daerah referensi.

D. Analisis Gabungan LQ dan DLQ

Untuk melihat perubahan posisi yang dialami sektor perekonomian dan sektor pariwisata digunakan analisis gabungan metode LQ dan DLQ, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika nilai $LQ > 1$ dan $DLQ \geq 1$, berarti sektor pariwisata tetap menjadi basis baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

- b. Jika nilai $LQ > 1$ dan $DLQ < 1$, berarti sektor pariwisata telah mengalami perubahan posisi dari basis menjadi non basis pada masa yang akan datang.
- c. Jika nilai $LQ \leq 1$ dan $DLQ \geq 1$, berarti sektor pariwisata telah mengalami reposisi dari non basis menjadi basis pada masa yang akan datang.
- d. Jika nilai $LQ \leq 1$ dan $DLQ < 1$, berarti sektor pariwisata tetap menjadi non basis baik pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang.

E. Analisis Shift Share

Analisis Shift Share digunakan untuk mengetahui sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi di suatu daerah. Shift Share dirumuskan sebagai:

$$G_{ij} = N_{ij} + P_{ij} + D_{ij}$$

$$N_{ij} = Y_{ij} \cdot r_n$$

$$P_{ij} = Y_{ij} (r_{in} - r_n)$$

$$D_{ij} = Y_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

$$r_{ij} = (Y_{ijt} - Y_{ij}) / Y_{ij}$$

$$r_{in} = (Y_{int} - Y_{in}) / Y_{in}$$

$$r_n = (Y_{nt} - Y_n) / Y_n$$

$$PB_{ij} = P_{ij} + D_{ij}$$

Dimana:

G_{ij} : Perubahan PDRB pariwisata di kabupaten/kota

N_{ij} : Komponen Regional pariwisata di kabupaten/kota

Pij : Komponen Proportional Shift pariwisata di kabupaten/kota

Dij : Komponen Differential Shift pariwisata di kabupaten/kota

PBij : Komponen Net Shift pariwisata di kabupaten/kota

Yij : PDRB pariwisata tahun awal di kabupaten/kota

Yin : PDRB pariwisata tahun awal di provinsi Jawa Tengah

Yn : PDRB total tahun awal di provinsi Jawa Tengah

Yijt : PDRB pariwisata tahun akhir di kabupaten/kota

Yint : PDRB pariwisata tahun akhir di provinsi Jawa Tengah

Ynt : PDRB total tahun akhir di provinsi Jawa Tengah

Untuk menghitung Shift Share provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan dengan mensubstitusi angka PDRB kabupaten/kota dengan angka PDRB provinsi Jawa Tengah dan angka PDRB provinsi Jawa Tengah dengan angka PDRB Nasional. Peningkatan nilai tambah bruto (PDRB) sektor pariwisata di suatu wilayah (Gij) melalui analisis Shift Share dapat didekomposisi menjadi 3 komponen yaitu:

1. Regional Share (Nij) merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh faktor luar. Sebagai contoh peningkatan kegiatan ekonomi daerah akibat kebijaksanaan yang diambil pemerintah Provinsi yang berlaku pada seluruh daerah di provinsi tersebut.
2. Proportional Shift (Pij) merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah yang baik, yaitu berspesialisasi pada sektor yang pertumbuhannya cepat. Selain itu komponen pertumbuhan proporsional tumbuh karena perbedaan sektor dalam permintaan produk akhir, perbedaan dalam ketersediaan bahan mentah, perbedaan dalam kebijakan ekonomi serta perbedaan dalam struktur dan keragaman pasar.

3. Differential Shift (Dij) merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah karena kondisi spesifik daerah yang bersifat kompetitif. Unsur pertumbuhan ini merupakan keuntungan kompetitif daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor daerah. Disamping itu, komponen Pergeseran bersih (PBij) yang merupakan penjumlahan Proportional Shift (Pij) dan Different Shift (Dij), dapat digunakan untuk mengidentifikasi pertumbuhan sektor ekonomi.

Dalam analisis pertumbuhan ekonomi regional komponen proportional shift (Pij) dan differential shift (Dij) lebih penting dibanding komponen regional share (Nij). Hal ini disebabkan karena komponen Dij digunakan untuk melihat perubahan pertumbuhan dari suatu kegiatan di wilayah studi terhadap kegiatan tersebut di wilayah referensi. Dari perubahan tersebut akan dapat dilihat berapa besar penambahan atau pengurangan pendapatan dari kegiatan tersebut. Sedangkan komponen Pij untuk melihat perubahan pertumbuhan suatu kegiatan di wilayah referensi terhadap kegiatan total (PDRB) di wilayah referensi. Klasifikasi wilayah/sektor berdasarkan Proportional Shift (Pij) dan Different Shift (Dij) dapat dikategorikan dalam 4 kategori yaitu:

1. Kategori I : Pij positif dan Dij positif merupakan sektor/wilayah dengan pertumbuhan sangat pesat.
2. Kategori II : Pij negatif dan Dij positif merupakan sektor/wilayah dengan kecepatan pertumbuhan terhambat namun berkembang.
3. Kategori III : Pij negatif dan Dij negatif merupakan sektor/wilayah dengan daya saing lemah dan kontribusi rendah.
4. Kategori IV : Pij positif dan Dij negatif merupakan sektor/wilayah dengan kecepatan pertumbuhan terhambat namun cenderung berpotensi.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat spesialisasi perekonomian di suatu daerah juga dapat dilakukan dengan modifikasi analisis Shift Share Estaban

Marguillas. Persamaan Shift Share menurut Estaban Marguillas mengandung unsur baru yang diberi notasi Y^*_{ij} didefinisikan sebagai suatu variabel wilayah (Y_{ij}), bila struktur wilayah sama dengan struktur wilayah atasnya atau $Y_{ij} = Y^*_{ij}$ maka Y^*_{ij} dirumuskan menjadi:

$$Y^*_{ij} = Y_j (Y_{in}/Y_n)$$

Pengaruh efek alokasi (*allocation effect*) belum dijelaskan dari suatu variabel wilayah untuk sektor i di wilayah j (A_{ij}), untuk mengetahui efek alokasi tersebut didekati dengan menggunakan rumus:

$$A_{ij} = (Y_{ij} - Y^*_{ij}) (r_{ij} - r_{in})$$

dimana:

$(Y_{ij} - Y^*_{ij})$: menggambarkan tingkat spesialisasi sektor i di suatu wilayah, jika $r_{ij} > r_{in}$.

$(r_{ij} - r_{in})$: menggambarkan tingkat keunggulan kompetitif sektor i di suatu wilayah.

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa A_{ij} sebagai pengaruh alokasi dapat dilihat dalam dua bagian yaitu tingkat spesialisasi sektor i di wilayah j ($Y_{ij} - Y^*_{ij}$) yang dikalikan dengan keunggulan kompetitif ($r_{ij} - r_{in}$). Persamaan tersebut dapat bermakna bahwa bila suatu wilayah mempunyai suatu spesialisasi di sektor-sektor tertentu, maka sektor-sektor tersebut pasti akan menikmati pula keunggulan kompetitif yang lebih baik.

Dapat dilihat bahwa komponen keunggulan kompetitif dibagi menjadi keunggulan kompetitif karena adanya homothetic employment dan keunggulan kompetitif karena efek alokasi. Adapun kriteria penilaian untuk analisis shiftshare ini adalah sebagai berikut:

- a. Bila nilai koefisien shift-share lebih besar atau sama dengan 1, maka disebut sebagai sektor kompetitif.
- b. Bila nilai koefisien shift-share kurang dari 1, maka disebut sebagai sektor tidak kompetitif.

Selanjutnya koefisien yang memenuhi kriteria diberi notasi (+), sementara yang tidak memenuhi kriteria diberi notasi (-). Untuk kriteria yang diambil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Analisis Shift Share Esteban Marquillas

Kode	Kriteria	Komponen	
		Spesialisasi ($Y_{ij}-Y^*_{ij}$)	Keunggulan Kompetitif ($r_{ij} - r_{in}$)
1.	Tidak memiliki keunggulan kompetitif namun terspesialisasi	+	-
2.	Tidak memiliki keunggulan kompetitif dan tidak terspesialisasi	-	-
3.	Memiliki keunggulan kompetitif namun tidak terspesialisasi	-	+
4.	Memiliki keunggulan kompetitif dan terspesialisasi	+	+

F. Analisis Overlay

Analisis Overlay dapat digunakan untuk menentukan sektor unggulan dengan menggabungkan hasil dari metode analisis LQ dan *Shift Share*. Nilai *Shift Share* yang digunakan untuk analisis kuadran adalah *Differential Shift (Dij)*. Tujuan dari analisis kuadran yaitu untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi yang potensial berdasarkan kriteria kontribusi dan kriteria pertumbuhan.

Berdasarkan gabungan analisis LQ dan *Shift Share* dapat disusun analisis overlay untuk menentukan mendeskripsikan klasifikasi dan tipologi daerah. Klasifikasi

daerah berdasarkan sektor basis dan non basis dengan pertumbuhan cepat atau lambat, dengan menggabungkan LQ dengan Differential Shift (Dij) akan diperoleh:

- Klasifikasi I : andalan jika sektor basis ($LQ \geq 1$) dan tumbuh cepat ($Dij > 0$)
- Klasifikasi II : unggulan jika sektor basis ($LQ \geq 1$) dan tumbuh lambat ($Dij < 0$)
- Klasifikasi III : prospektif jika bukan sektor basis ($LQ < 1$) dan tumbuh cepat ($Dij > 0$)
- Klasifikasi IV : tertinggal jika bukan sektor basis ($LQ < 1$) dan tumbuh lambat ($Dij < 0$)

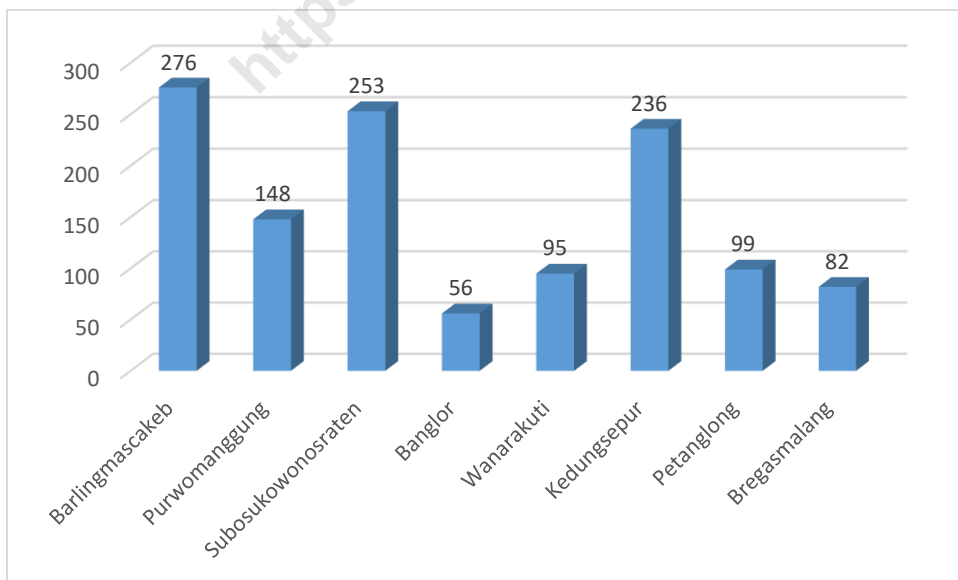
BAB. III

PERKEMBANGAN PARIWISATA WILAYAH PEMBANGUNAN DI JAWA TENGAH

3.1. Potensi Pariwisata menurut Wilayah Pembangunan

Daya Tarik Wisata dapat berupa alam, budaya, tata hidup, dan lainnya yang memiliki nilai jual untuk dikunjungi ataupun dinikmati oleh wisatawan, sekaligus juga merupakan sasaran utama wisatawan dalam mengunjungi suatu daerah atau Negara. Dalam pengertian luas bahwa apa saja yang mempunyai daya tarik wisata atau menarik minat bagi wisatawan dapat disebut sebagai Objek dan Daya Tarik Wisata. Daya Tarik wisata memberikan keuntungan ekonomi yang memperbaiki taraf, kualitas dan pola hidup komunitas setempat, tetapi juga peningkatan dan pemeliharaan lingkungan yang lebih baik.

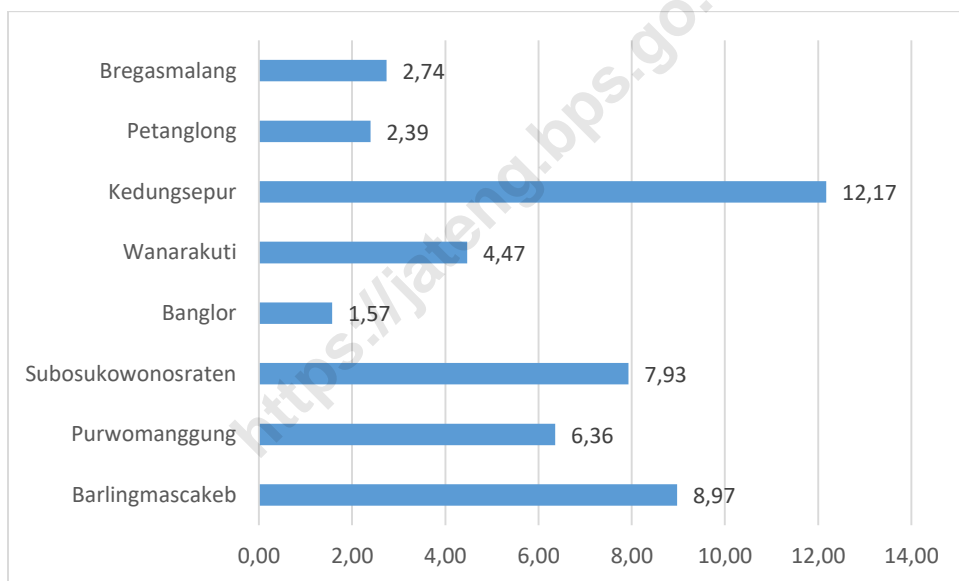
Gambar 3.1. Sebaran Daya Tarik Wisata Menurut Wilayah Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah, 2022



Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah

Data dari Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menunjukkan jumlah daya Tarik wisata di wilayah pembangunan sangat bervariasi. Sampai tahun 2022 wilayah pembangunan di Jawa Tengah dengan jumlah Daya Tarik Wisata terbanyak adalah Barlingmascakeb sebanyak 276 lokasi disusul Subosukowonosraten sebanyak 253 lokasi dan Kedungsepur sebanyak 236 lokasi. Sedangkan wilayah pembangunan dengan jumlah Daya Tarik Wisata paling sedikit adalah Banglor sebanyak 56 lokasi dan Bregasmalang sebanyak 82 lokasi.

Gambar 3.2. Sebaran Pengunjung Daya Tarik Wisata dan Event (Juta Pengunjung) Menurut Wilayah Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah 2022



Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah

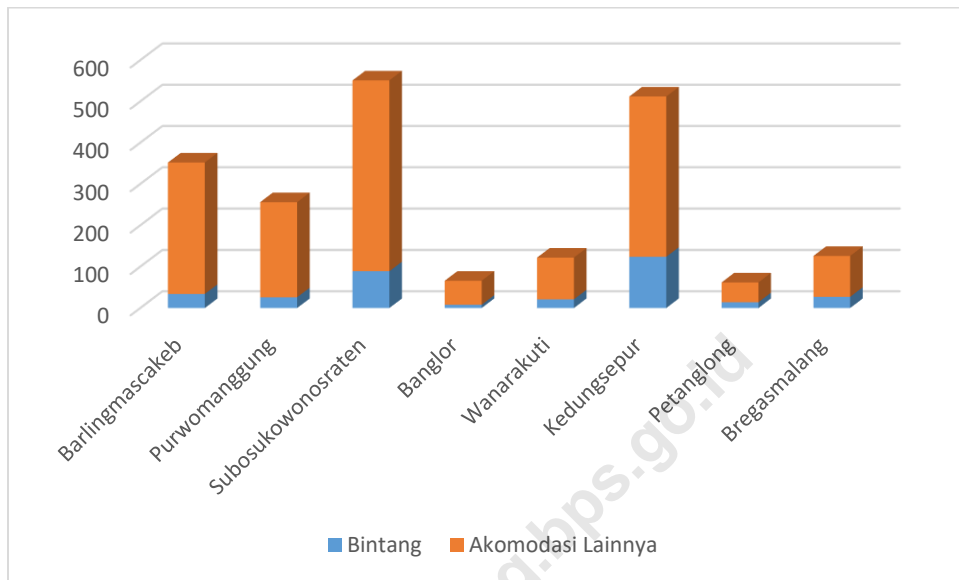
Meskipun jumlah Daya Tarik Wisata wilayah Barlingmascakeb berada di urutan pertama, namun berdasarkan data Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ternyata jumlah pengunjungnya hanya menempati urutan kedua terbanyak selama tahun 2022. Jumlah pengunjung Daya Tarik Wisata dan Event di Barlingmascakeb selama tahun 2022 tercatat sebanyak 8,97 juta pengunjung. Pengunjung Daya Tarik Wisata dan Event terbanyak di urutan pertama adalah Kedungsepur sebanyak 12,17 juta pengunjung dan di urutan ketiga adalah

Subosukowonosraten sebanyak 7,93 juta pengunjung. Sedangkan Banglor jumlah pengunjung yang hadir ke wilayah pembangunan tersebut merupakan yang paling sedikit dengan jumlah pengunjung sebanyak 1,57 juta pengunjung.

Jasa akomodasi dan perhotelan tidak dapat dipisahkan dari pariwisata. Kegiatan kepariwisataan harus ditunjang akomodasi perhotelan yang bagus. Akomodasi sejalan dengan mata rantai kegiatan wisata di daerah. Wisatawan akan memerlukan tempat tinggal untuk sementara selama dalam perjalanan agar dapat beristirahat dengan menyenangkan. Adanya sarana akomodasi, maka akan mendorong wisatawan untuk berkunjung dan menikmati objek dan daya tarik wisata di daerah dengan waktu yang relatif lebih lama. Informasi mengenai akomodasi akan mempengaruhi penilaian wisatawan tentang pilihan jenis akomodasi, baik jenis fasilitas dan pelayanan yang diberikan, tingkat harga, jumlah kamar yang tersedia, maupun pemandangan alam yang disajikan oleh pihak hotel. Pemandangan alam yang menjadi view hotel dapat berupa sungai, pantai, puncak, gunung.

Akomodasi perhotelan sebagai sarana pariwisata dapat menjadi ujung tombak wisata kepariwisataan. Usaha yang dilakukan secara langsung dengan memberikan pelayanan kepada wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata. Keberadaannya bergantung kepada wisatawan agar tertarik dengan adanya kegiatan perjalanan wisata (mmc.kalteng.go.id:2018). Seperti halnya Daya Tarik Wisata, hotel dan akomodasi lainnya juga menyebar secara tidak merata di wilayah pembangunan Jawa Tengah. Berdasarkan Survei VHT-L yang dilaksanakan BPS Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022, jumlah hotel berbintang dan akomodasi paling banyak dimiliki Subosukawonosraten jumlah hotel berbintang dan akomodasi lain sebanyak 551 buah. Sementara itu meskipun Kedungsepur berada di peringkat kedua dengan sebanyak 512 buah namun ternyata jumlah hotel berbintangnya paling banyak dengan 124 buah hotel berbintang. Berikutnya adalah Barlingmascakeb sebanyak 352 buah yang terdiri dari 34 buah hotel berbintang dan 318 buah akomodasi lainnya.

Gambar 3.3. Sebaran Hotel dan Jasa Akomodasi Lainnya Menurut Wilayah Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah 2022



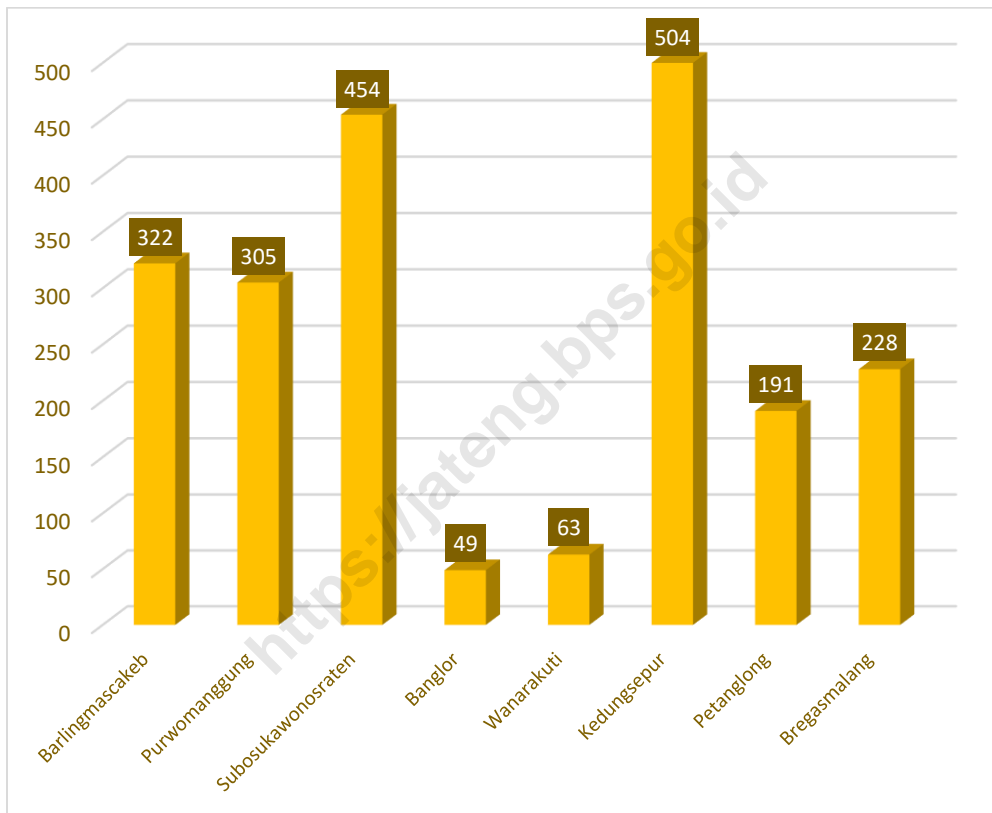
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Dalam industri pariwisata, hotel bukan satu-satunya bentuk akomodasi bagi wisatawan. Hotel dan restoran merupakan salah satu faktor penunjang utama kegiatan pariwisata. Wisatawan yang berkunjung ke suatu objek wisata tentu ingin menikmati perjalanan wisatanya, sehingga pelayanan makanan dan minuman harus mendukung. Apabila suatu daerah tujuan wisata mempunyai makanan yang khas, wisatawan yang datang selain menikmati atraksi wisata. Hal yang harus diperhatikan dalam penyediaan fasilitas makanan dan minuman berupa jenis dan variasi makanan yang ditawarkan, tingkat kualitas makanan dan minuman yang diberikan, tingkat harga, tingkat higienis.

Dari data Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ternyata restoran/rumah makan di Jawa Tengah tersebar secara tidak merata di wilayah pembangunan. Jumlah restoran/rumah makan terbanyak sebanyak 504 buah yang berada di wilayah Kedungsepur, disusul wilayah Subosukawonosraten sebanyak 454 buah dan wilayah Barlingmascakeb sebanyak 322 buah. Meskipun

beberapa wilayah memiliki jumlah restoran/rumah makan lebih dari seratus, namun masih ada wilayah pembangunan yang memiliki restoran/rumah makan di bawah seratus, seperti wilayah Banglor dan wilayah Wanarakuti.

Gambar 3.4. Sebaran Restoran/Rumah Makan Menurut Wilayah Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah 2021



Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah

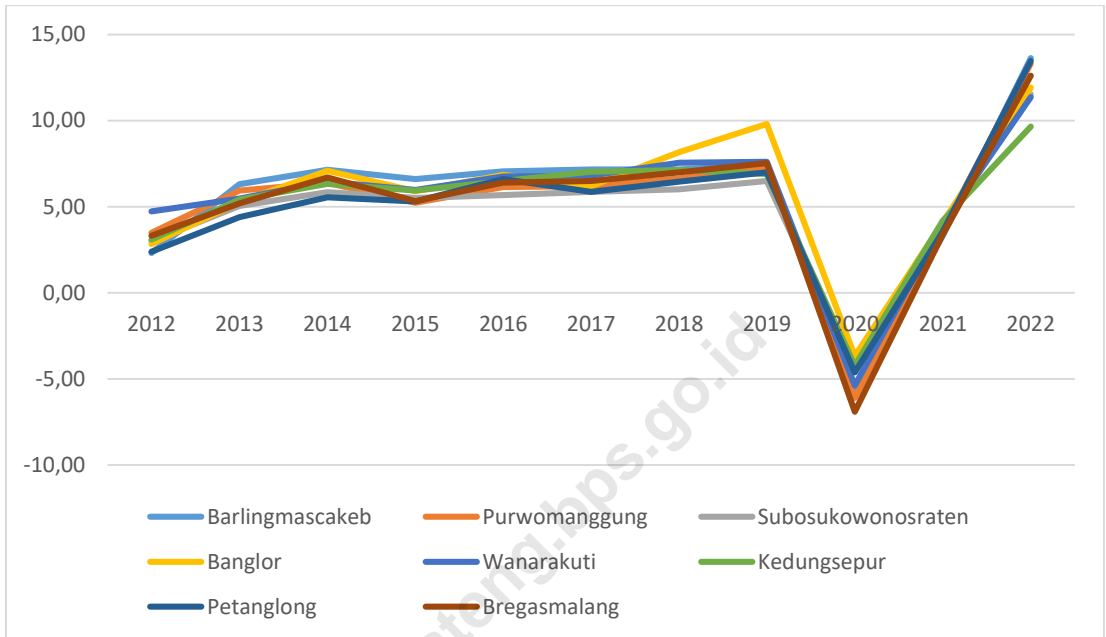
3.2. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pariwisata menurut Wilayah Pembangunan

Selama sebelas tahun terakhir (2012-2022) nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pariwisata diseluruh wilayah pembangunan mengalami pertumbuhan yang positif di setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 PDRB pariwisata di seluruh wilayah pembangunan mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif. Pada tahun 2012 wilayah pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Wanarakuti sebesar 4,77 persen disusul Petanglong dan Bregasmalang sebesar 3,07 persen, sedangkan yang terendah adalah Bregasmalang sebesar 2,14 persen.

Kontraksi ekonomi pada tahun 2020 berimbas terhadap sektor pariwisata yang dirasakan oleh seluruh wilayah pembangunan di Jawa Tengah. Kontraksi sektor pariwisata terdalam dialami oleh Bregasmalang sebesar minus 6,90 persen disusul Barlingmascakeb sebesar minus 5,56 persen dan Wanarakuti sebesar minus 5,38 persen. Sedangkan kontraksi paling kecil dialami oleh Purwomanggung sebesar minus 2,67 persen.

Pada tahun 2022, sektor pariwisata sudah mulai pulih pertumbuhannya masih sudah mulai meningkat jika dibandingkan kondisi sebelum terjadinya pandemi covid-19. Wilayah pembangunan Barlingmascakeb memiliki pertumbuhan sektor ekonomi tertinggi sebesar 13,64 persen, disusul Petanglong sebesar 13,47 persen dan Purwomanggung sebesar 13,32 persen. Sedangkan wilayah pembangunan dengan pertumbuhan sektor pariwisata yang paling rendah adalah Kedungsepur 9,65 persen..

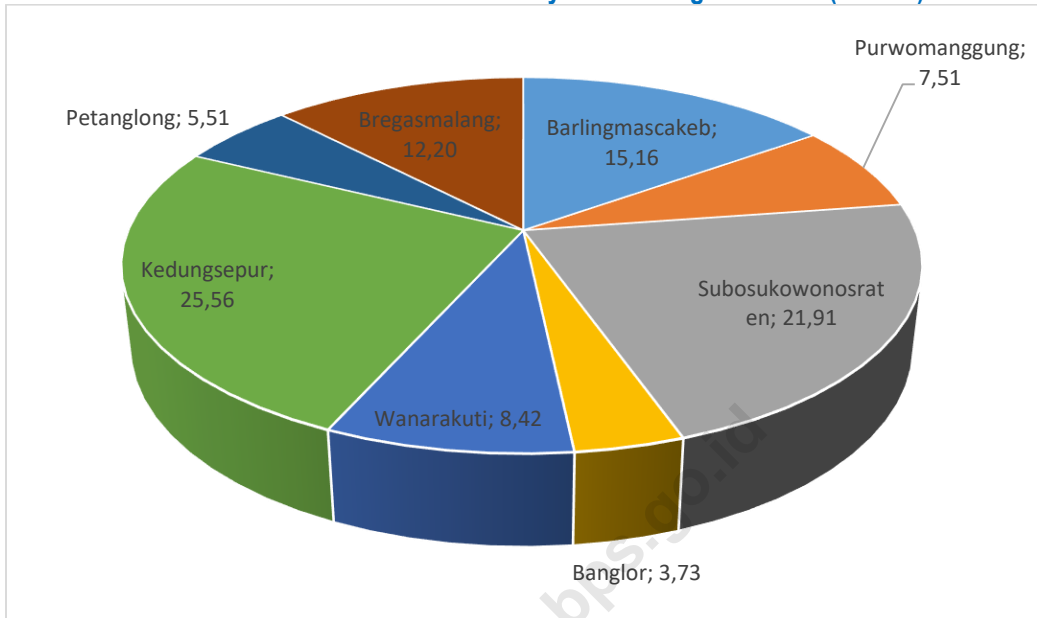
Gambar 3.5. Pertumbuhan Sektor Pariwisata menurut Wilayah Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2022 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

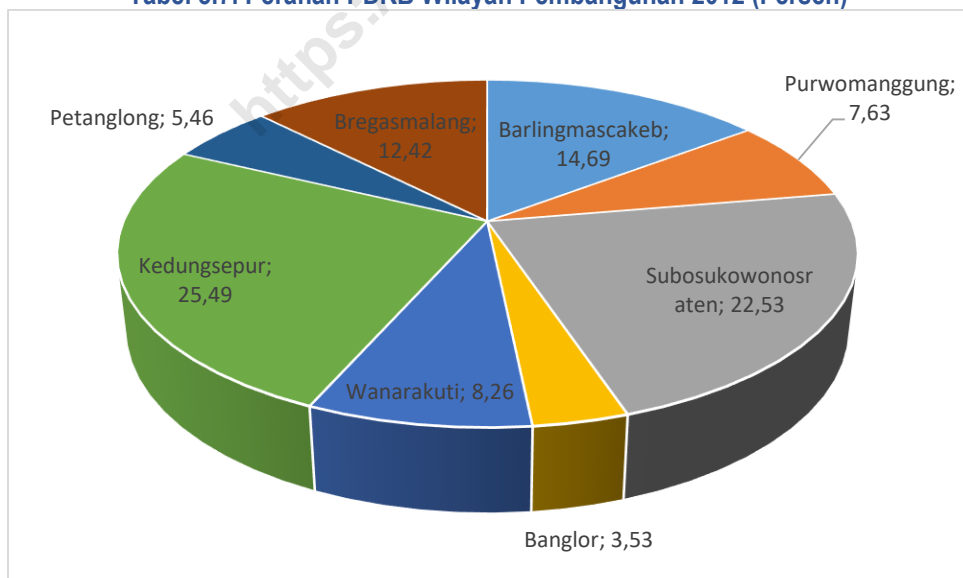
Lebih dari seperempat pembentukan PDRB sektor pariwisata Jawa Tengah pada tahun 2022 disumbang oleh Wilayah Pembangunan Kedungsepur sebesar 25,56 persen disusul Subosukawonosraten yang menyumbang 21,91 persen, Barlingmascakeb sebesar 15,16 persen dan Bregasmalang sebesar 12,20 persen. Kontribusi wilayah pembangunan lainnya terhadap pembentukan PDRB sektor pariwisata Jawa Tengah masih di bawah 10 persen, dengan kontribusi Wanarakuti sebesar 8,42 persen, Purwomanggung sebesar 7,51 persen, Petanglong sebesar 5,51 persen dan Banglor sebesar 3,73 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, wilayah pembangunan yang mengalami kenaikan kontribusi adalah Barlingmascakeb, Banglor, Wanarakuti dan Kedungsepur. Sedangkan wilayah pembangunan lainnya mengalami penurunan kontribusi.

Tabel 3.6. Peranan PDRB Pariwisata Wilayah Pembangunan 2022 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Tabel 3.7. Peranan PDRB Pariwisata Wilayah Pembangunan 2012 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

BAB. IV

KETIMPANGAN PARIWISATA WILAYAH PEMBANGUNAN DI JAWA TENGAH

4.1. Location Quotient (LQ)

Analisis LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis yaitu sebagai langkah awal untuk memahami sektor yang paling potensial untuk dikembangkan pada masa yang akan datang. Sektor pariwisata dikatakan unggulan apabila memperoleh nilai $LQ > 1$, hal ini menyiratkan bahwa tingkat spesialisasi dalam sektor pariwisata dari masing-masing wilayah pembangunan tersebut lebih besar apabila dibandingkan dengan sektor pariwisata di tingkat provinsi. Dengan kata lain jika $LQ > 1$, mempunyai arti bahwa sektor pariwisata merupakan sektor terkemuka di wilayah pembangunan tersebut dan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pendorong ekonomi lokal. Tetapi apabila suatu wilayah pembangunan memperoleh nilai $LQ < 1$, ini berarti bahwa tingkat spesialisasi dalam sektor pariwisata dari wilayah pembangunan tersebut kurang dari sektor pariwisata di tingkat provinsi. Oleh karena itu, sektor pariwisata bukan sektor yang dominan dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai pendorong ekonomi lokal, dan apabila nilai $LQ = 1$, ini menyiratkan bahwa tingkat spesialisasi dalam sektor pariwisata di suatu wilayah pembangunan sama dengan di tingkat provinsi, peran sektor pariwisata di wilayah pembangunan tersebut relatif sama dengan peran sektor pariwisata di tingkat provinsi.

Dilihat dari rata-rata nilai LQ 2012 hingga 2022, sebagian besar wilayah pembangunan di Jawa Tengah memiliki sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan atau basis. Wilayah pembangunan tersebut antara lain Purworejo, Purwokerto, Subosukawonosraten, Banglor, Kedungsepur, Petanglong dan Bregasmalang. Sektor basis merupakan sektor potensial yang dapat menggambarkan kekuatan ekonomi yang cukup baik dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan

ekonomi dimana pada dasarnya sektor tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan di daerahnya bahkan mampu melakukan ekspor.

Walaupun sektor pariwisata bukan merupakan sektor unggulan pada wilayah pembangunan Barlingmascakeb dan Wanarakuti, namun pembangunan sektor pariwisata pada wilayah pembangunan tersebut tidak boleh dilupakan. Wilayah pembangunan tersebut seharusnya juga menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah setempat agar sektor pariwisata yang masih menjadi sektor non unggulan di wilayah pembangunan tersebut mampu menjadi sektor basis di masa mendatang. Pembangunan pariwisata harus mengedepankan potensi kawasan wilayah dan kemampuan masyarakatnya. Dalam hal ini keunggulan komperatif yang berupa sumber daya alam perlu diiringi dengan peningkatan yang diwujudkan melalui penciptaan sumber daya manusia pariwisata yang makin professional.

Gambar 4.1. Sebaran Sektor Unggulan Pariwisata Wilayah Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2022

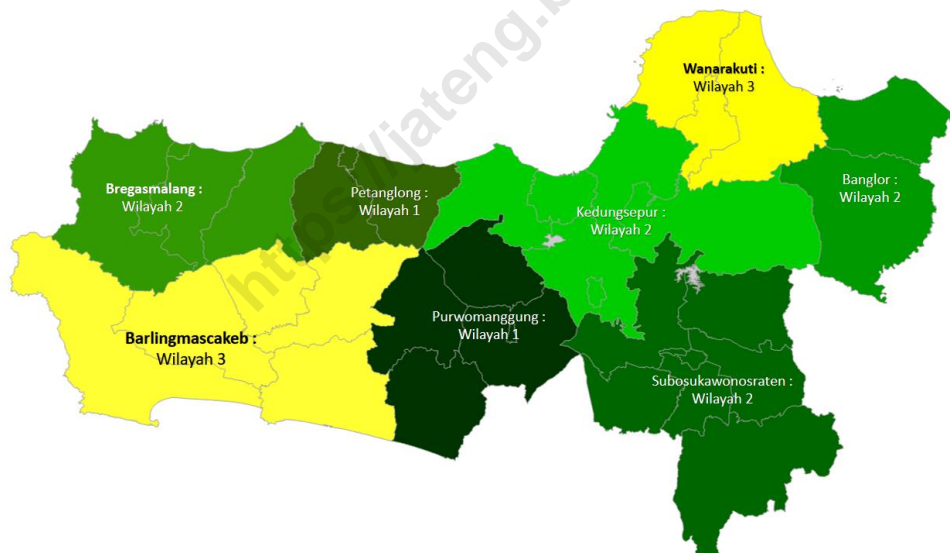


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, data diolah

4.2. Pemetaan Wilayah menurut Kategori LQ

Pada pemetaan wilayah menurut kategori LQ, nilai SLQ merupakan rata-rata LQ dari setiap SLQ yang dihasilkan pada 2012-2022. Selain itu untuk menggunakan LQ dalam pengambilan keputusan ekonomi regional adalah dengan melihat bagaimana nilai LQ berubah sepanjang tahun (dinamis). Nilai dari perubahan LQ ini menyediakan informasi yang bernilai apakah suatu sektor ekonomi suatu daerah meningkat atau turun konsentrasinya secara relatif terhadap daerah lain. Hasil indeks LQ dalam analisis dapat dipergunakan sebagai cerminan potensi lebih dari suatu daerah secara relatif terhadap daerah lainnya.

Gambar 4.2. Sebaran wilayah pembangunan menurut Diagram Pemetaan Wilayah Kategori LQ Sektor Pariwisata di Jawa Tengah, Tahun 2012-2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, data diolah

Pemetaan wilayah menurut kategori LQ pada gambar 4.2 memperlihatkan sektor pariwisata dilihat dari potensi dan kemampuan bersaing antar wilayah pembangunan di Jawa Tengah, sebagai berikut :

- Wilayah 1 : daerah dengan klasifikasi sektor pariwisata mampu bersaing dan sekaligus potensial ($SLQ > 1$ dan $\Delta LQ > 0$)

Tipe daerah ini memiliki kemampuan bersaing dalam sektor pariwisata sekaligus memiliki potensi tinggi dalam pengembangannya merupakan daerah yang dapat dikategorikan daerah pariwisata yang maju dan potensial, sehingga dapat dijadikan daerah percontohan sektor pariwisata. Wilayah pembangunan dengan klasifikasi sektor pariwisata mampu bersaing dan sekaligus potensial di Jawa Tengah antara lain Purwomanggung dan Petanglong.

- Wilayah 2 : daerah dengan klasifikasi sektor pariwisata yang mampu bersaing tetapi tidak potensial ($SLQ > 1$ dan $\Delta LQ < 0$)

Wilayah dengan nilai SLQ tinggi menunjukkan daerah tersebut masih memiliki keunggulan relatif pada sektor pariwisata daripada daerah lain. Hasil analisis LQ menunjukkan sebagian besar wilayah pembangunan di Jawa Tengah yang memerlukan perhatian lebih khusus karena terjadi penurunan LQ. Kondisi ini mencerminkan menurunnya potensi relatif daerah pada sektor pariwisata. Sebagian besar wilayah pembangunan di Jawa Tengah tergolong klasifikasi daerah dengan pariwisata yang maju, tetapi menurun potensinya, meliputi Subosukawonosraten, Banglor, Kedungsepur dan Bregasmalang.

- Wilayah 3 : daerah dengan klasifikasi sektor pariwisata potensial tetapi kurang mampu bersaing ($SLQ < 1$ dan $\Delta LQ > 0$)

Dari observasi terhadap 8 wilayah pembangunan di Jawa Tengah, hasil analisis LQ mengidentifikasi wilayah pembangunan dengan kategori pariwisata yang kurang mampu bersaing, tetapi memiliki potensi pengembangan yang tinggi ada dua wilayah pembangunan. Wilayah pembangunan ini meliputi Barlingmascakeb dan Wanarakuti. Kedua wilayah pembangunan ini dapat menjadi pendorong majunya sektor pariwisata di wilayah Jawa Tengah.

- Wilayah 4 : daerah dengan klasifikasi sektor pariwisata yang kurang mampu bersaing dan tidak potensial ($SLQ < 1$ dan $\Delta LQ < 0$)

Wilayah pembangunan di Jawa Tengah tidak ada yang masuk dalam kategori memiliki tingkat persaingan pariwisata yang rendah sekaligus tidak potensial.

4.3. Analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ)

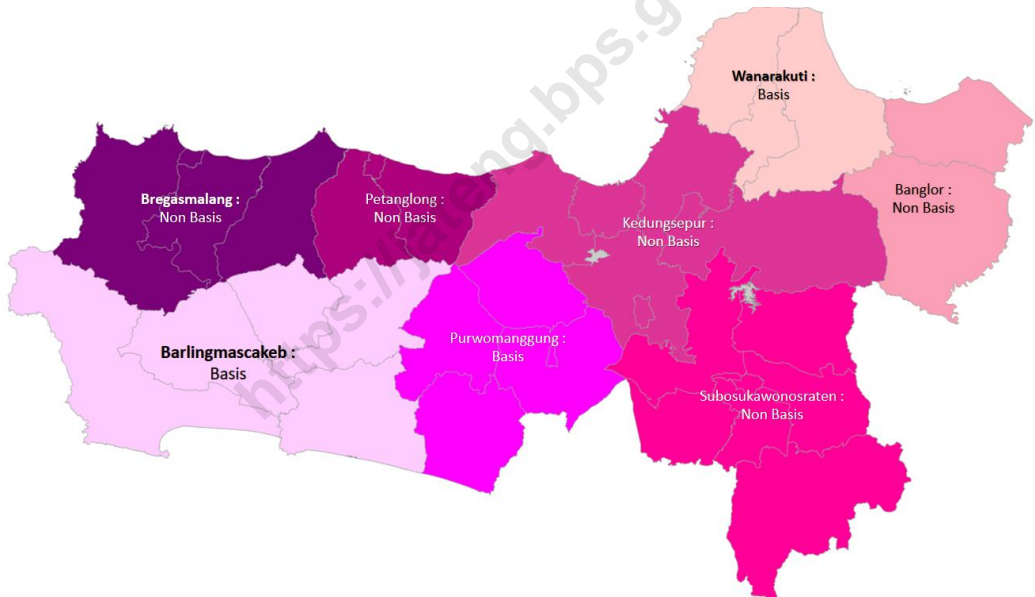
Namun, penentuan sektor basis dengan menggunakan LQ memiliki kelemahan yaitu bersifat statis. Artinya sektor yang menjadi basis pada tahun tertentu belum tentu menjadi unggulan di masa yang akan datang dan sebaliknya sektor yang tidak menjadi basis bisa menjadi basis. Untuk mengatasi kelemahan LQ, maka digunakan analisis varians dari LQ, yaitu *Dynamic Location Quotient* (DLQ) yang berguna untuk melihat reposisi sektoral (perubahan posisi sektor).

Analisis untuk mengetahui terjadinya suatu perubahan posisi terhadap sektor pariwisata wilayah pembangunan di Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui metode *Dynamic Location Quotient* (DLQ). Pada dasarnya penafsiran metode DLQ dengan LQ adalah sama, hanya saja metode *Location Quotient* mempunyai kelemahan yaitu analisisnya yang bersifat statis sehingga tidak dapat menangkap kemungkinan perubahan-perubahan yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Karena sektor basis pada saat ini belum tentu akan menjadi sektor basis pada masa yang akan datang dan sebaliknya juga sektor non basis pada saat ini mungkin saja akan berubah menjadi sektor basis pada selanjutnya. Pada metode DLQ lebih menekankan pada proporsi laju pertumbuhan sektor pariwisata (PDRB) wilayah pembangunan dibandingkan sektor pariwisata Jawa Tengah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah kedepannya sektor pariwisata akan tetap akan menjadi basis atau terjadi reposisi menjadi non basis.

Hasil analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ) menunjukkan bahwa sektor pariwisata sebagian besar wilayah pembangunan di Jawa Tengah tidak mengalami perubahan posisi karena memiliki nilai $DLQ > 1$ sehingga kedepan sektor pariwisata

masih tetap menjadi sektor basis yang dapat diunggulkan dan mempunyai daya saing yang tinggi dibandingkan sektor pariwisata terhadap Jawa Tengah. Ada lima wilayah pembangunan di Jawa Tengah dengan nilai DLQ ≤ 1 sehingga sektor pariwisata di kabupaten/kota tersebut tidak dapat diharapkan untuk menjadi sektor basis pada masa yang akan datang. Kelima wilayah pembangunan tersebut adalah Subosukowonosraten, Banglor, Kedungsepur, Petanglong dan Bregasmalang.

Gambar 4.3. Sebaran wilayah pembangunan menurut *Dynamic Location Quotient* (DLQ) Sektor Pariwisata di Jawa Tengah, Tahun 2012-2022

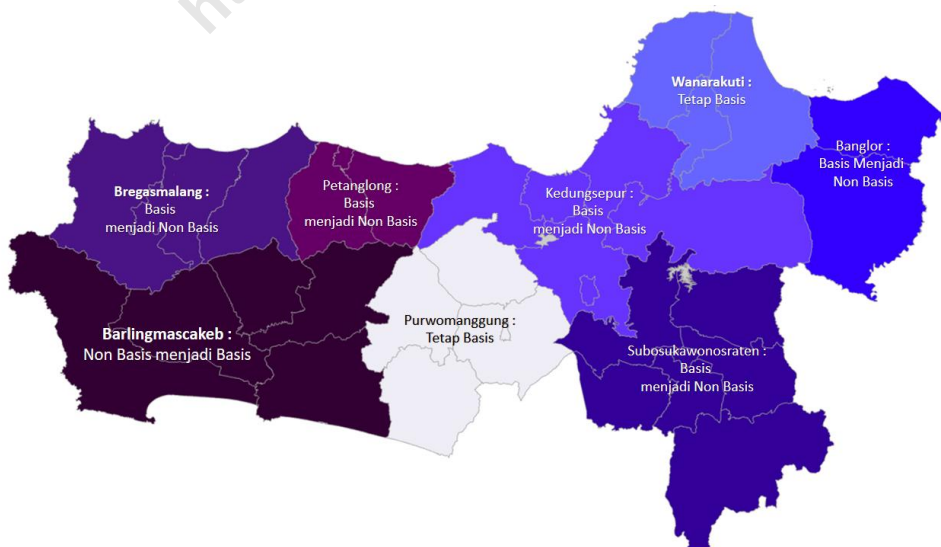


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, data diolah

4.4. Analisis Gabungan *Location Quotient* (LQ) Dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ)

Analisis Gabungan *Location Quotient* (LQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ) digunakan untuk mengetahui perubahan posisi dari setiap sektor perekonomian maupun sektor pariwisata. Hasil analisis gabungan *Location Quotient* (LQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ), wilayah pembangunan di Jawa Tengah yang sektor pariwisatanya dari non basis menjadi basis yaitu Barlingmascakeb. Wilayah pembangunan yang mengalami perubahan posisi sektor pariwisata dari basis menjadi non basis adalah Subosukowonosraten, Banglor, Kedungsepur, Petanglong dan Bregasmalang. Ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah agar kedepannya dapat terus menjadikan sektor pariwisata menjadi sektor basis yang dapat diandalkan di masa yang akan datang. Sedangkan wilayah pembangunan di Jawa Tengah sektor pariwisatanya tidak mengalami perubahan dan tetap menjadi sektor basis adalah Purwomanggung dan Wanarakuti.

Gambar 4.4. Sebaran wilayah menurut Analisis Gabungan *Location Quotient* (LQ) Dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ) Sektor Pariwisata di Jawa Tengah, Tahun 2012-2022



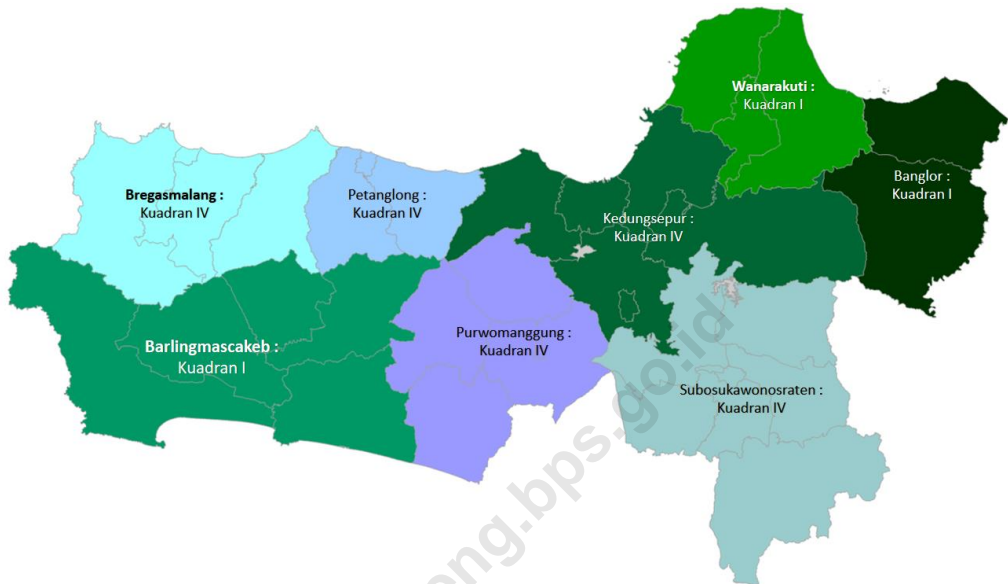
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, data diolah

4.5. Analisis Shift Share

Analisis shift share adalah salah satu teknik kuantitatif yang biasa digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah relatif terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih tinggi sebagai pembandingan atau referensi. Untuk tujuan tersebut, analisis ini menggunakan 3 informasi dasar yang berhubungan satu sama lain yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi referensi wilayah pembangunan atau provinsi (*province growth effect -Nij*), yang menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi provinsi terhadap perekonomian daerah. Kedua, pergeseran proporsional (*proporsional shift -Pij*) yang menunjukkan perubahan relatif kinerja suatu sektor di daerah tertentu terhadap sektor yang sama di referensi wilayah pembangunan atau provinsi. Pergeseran proporsional (*proportional shift*) disebut juga pengaruh sektor pariwisata. Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada sektor pariwisata yang tumbuh lebih cepat ketimbang sektor pariwisata pada wilayah yang dijadikan referensi. Ketiga, pergeseran diferensial (*differential shift -Dij*) yang memberikan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing sektor pariwisata daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan referensi. Jika pergeseran diferensial dari suatu sektor pariwisata adalah positif, maka sektor pariwisata tersebut relatif lebih tinggi daya saingnya dibandingkan sektor pariwisata yang sama pada perekonomian yang dijadikan referensi. Pergeseran diferensial disebut juga pengaruh keunggulan kompetitif.

Bila dirinci menurut wilayah pembangunan, nilai shift share PDRB sektor pariwisata atas dasar harga konstan periode tahun 2012 sampai 2022 menunjukkan sebagian besar wilayah pembangunan di Jawa Tengah memiliki nilai pergeseran bersih positif yang berarti pertumbuhan sektor pariwisata wilayah pembangunan tersebut termasuk dalam kelompok yang progresif (maju). Hanya Purwomanggung yang memiliki nilai PB negatif sehingga termasuk kelompok dengan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata lamban.

Gambar 4.5. Sebaran wilayah pembangunan menurut Analisis Shift Share
Sektor Pariwisata di Jawa Tengah, Tahun 2012-2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, data diolah

Bila dilihat besaran Pij dan Dij, maka wilayah pembangunan di Jawa Tengah hanya dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu:

1. Di kuadran I (Pij positif dan Dij positif), ada tiga wilayah pembangunan di Jawa Tengah memiliki pertumbuhan sektor pariwisata yang cepat dan memiliki daya saing yaitu Barlingmascakeb, Banglor dan Wanarakuti.
2. Di kuadran IV (Pij positif dan Dij negatif), yaitu wilayah pembangunan yang memiliki potensi tetapi tertekan atau memiliki daya saing tinggi tetapi pertumbuhan ekonomi sektor pariwisatanya lamban yaitu Purwomanggung, Subosukawonosraten, Kedungsepur, Petanglong dan Bregasmalang. Kelima wilayah pembangunan tersebut merupakan sektor/wilayah dengan kecepatan pertumbuhan terhambat namun cenderung berpotensi.

Seluruh wilayah pembangunan di Jawa Tengah memiliki daya saing atau potensi sektor pariwisata yang tinggi, hanya terdapat perbedaan dalam kecepatan pertumbuhan sektor pariwisata.

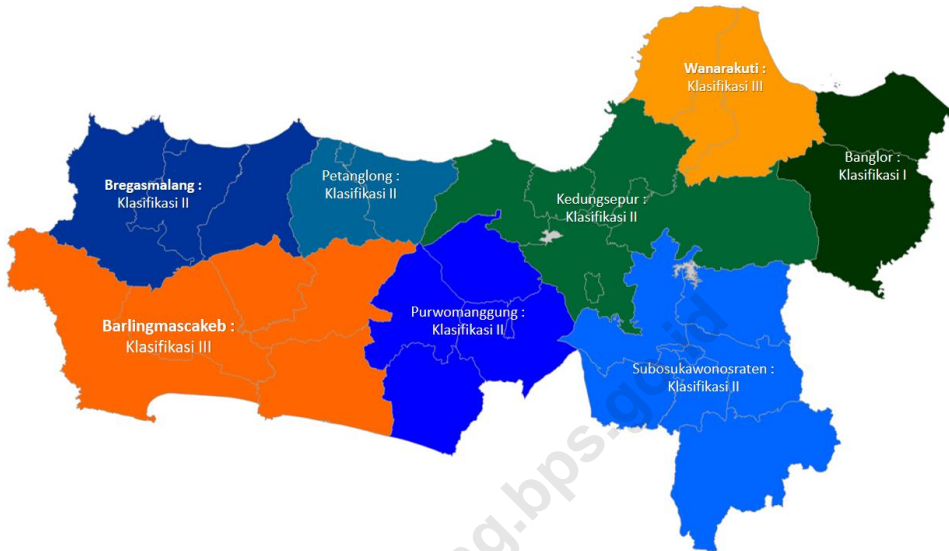
4.6. Analisis Overlay

Berdasarkan gabungan analisis LQ dan Shift Share dapat disusun analisis overlay untuk menentukan mendeskripsikan klasifikasi dan tipologi daerah. Klasifikasi daerah berdasarkan sektor basis dan non basis dengan pertumbuhan cepat atau lambat, dengan menggabungkan LQ dengan *Differential Shift* (Dij) akan diperoleh:

1. Klasifikasi I : sektor basis ($LQ \geq 1$) dan tumbuh cepat ($Dij > 0$)
2. Klasifikasi II : sektor basis ($LQ \geq 1$) dan tumbuh lambat ($Dij < 0$)
3. Klasifikasi III : bukan sektor basis ($LQ < 1$) dan tumbuh cepat ($Dij > 0$)
4. Klasifikasi IV : bukan sektor basis ($LQ < 1$) dan tumbuh lambat ($Dij < 0$)

Berdasarkan klasifikasi di atas nampak bahwa dua wilayah pembangunan di klasifikasi I, artinya sektor pariwisata pada wilayah tersebut merupakan sektor basis/unggulan dan memiliki keunggulan kompetitif/pertumbuhan cepat, yaitu Banglor. Kemudian yang termasuk klasifikasi II adalah Purwomanggung, Subosukawonosraten, Kedungsepur, Petanglong dan Bregasmalang merupakan wilayah pembangunan dengan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan namun tidak memiliki keunggulan kompetitif/pertumbuhan lambat. Wilayah pembangunan yang termasuk klasifikasi III adalah Barlingmascakeb dan Wanarakuti. Artinya walaupun tidak menjadi sektor unggulan namun sebenarnya memiliki keunggulan kompetitif/pertumbuhan cepat. Sedangkan klasifikasi IV merupakan wilayah pembangunan yang tidak memiliki keunggulan kompetitif/pertumbuhan lambat, tetapi tidak ada wilayah pembangunan yang masuk ke dalam klasifikasi ini.

**Gambar 4.6. Sebaran wilayah pembangunan menurut Analisis Overlay
Sektor Pariwisata di Jawa Tengah, Tahun 2012-2022**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, data diolah

Dari hasil analisis yang sudah diuraikan pada bagian terdahulu, maka kajian ini dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam upaya mewujudkan pembangunan Jawa Tengah yang lebih menekankan pada karakter dan potensi wilayah serta memperlihatkan keberagaman, maka dikembangkan 8 (delapan) wilayah pengembangan utama. Pengelompokkan kewilayahan tersebut bertujuan untuk dapat lebih mengoptimalkan potensi lokal, mempertahankan keberagaman hasil produk serta menciptakan pemerataan pembangunan yang memiliki ciri kuat produk unggulan.
2. Sampai tahun 2022 wilayah pembangunan di Jawa Tengah dengan jumlah Daya Tarik Wisata terbanyak adalah Barlingmascakeb sebanyak 276 lokasi disusul Subosukowonosraten sebanyak 253 lokasi dan Kedungsepur sebanyak 236 lokasi. Sedangkan wilayah pembangunan dengan jumlah Daya Tarik Wisata paling sedikit adalah Banglor sebanyak 56 lokasi dan Bregasmalang sebanyak 82 lokasi.
3. Jumlah hotel berbintang dan akomodasi paling banyak dimiliki Subosukawonosraten jumlah hotel berbintang dan akomodasi lain sebanyak 551 buah. Sementara Jumlah restoran/rumah makan terbanyak sebanyak 504 buah yang berada di wilayah Kedungsepur.
4. Selama sebelas tahun terakhir (2012-2022) nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pariwisata diseluruh wilayah pembangunan mengalami pertumbuhan yang positif di setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 PDRB pariwisata diseluruh wilayah pembangunan mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif.

5. Lebih dari seperempat pembentukan PDRB sektor pariwisata Jawa Tengah pada tahun 2022 disumbang oleh Wilayah Pembangunan Kedungsepur sebesar 25,56 persen disusul Subosukawonosraten yang menyumbang 21,91 persen, Barlingmascakeb sebesar 15,16 persen dan Bregasmalang sebesar 12,20 persen. Kontribusi wilayah pembangunan lainnya terhadap pembentukan PDRB sektor pariwisata Jawa Tengah masih di bawah 10 persen
6. Dilihat dari rata-rata nilai LQ 2012 hingga 2022, sebagian besar wilayah pembangunan di Jawa Tengah memiliki sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan atau basis. Wilayah pembangunan tersebut antara lain Purwomanggung, Subosukawonosraten, Banglor, Kedungsepur, Petanglong dan Bregasmalang.
7. Hasil analisis pemetaan kategori LQ menunjukkan sebagian besar wilayah pembangunan di Jawa Tengah yang memerlukan perhatian lebih khusus karena terjadi penurunan LQ. Kondisi ini mencerminkan menurunnya potensi relatif daerah pada sektor pariwisata. Sebagian besar wilayah pembangunan di Jawa Tengah tergolong klasifikasi daerah dengan pariwisata yang maju, tetapi menurun potensinya, meliputi Subosukawonosraten, Banglor, Kedungsepur dan Bregasmalang.

- Anggraini, Dewitri. 2017. Analisis Hubungan Komplementer Dan Kompetisi Antar Destinasi Pariwisata (Studi Kasus: 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Di Indonesia). Tesis MPKP FEB UI.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2023). Jawa Tengah Dalam Angka 2023. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2023). PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Tengah 2022. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2023). Statistik Tingkat Penghunian Kamar Hotel Provinsi Jawa Tengah 2022. Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Jawa Tengah (2023). Buku Saku Pariwisata Jawa Tengah 2022. Semarang : Diporapar Provinsi Jawa Tengah
- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Jawa Tengah (2023). Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah Dalam Angka 2022. Semarang : Diporapar Provinsi Jawa Tengah.
- Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Jawa Tengah (2021). Renstra Disporapar Provinsi Jawa Tengah 2018-2023. Semarang : Diporapar Provinsi Jawa Tengah.
- Heriawan, Rusman. 2004. "Peranan dan Dampak Pariwisata Pada Perekonomian Indonesia : Suatu Pendekatan Model I-O dan SAM". Disertasi. Doktoral Institut Pariwisata Bogor. Bogor.

LPEM, FEB Universitas Indonesia (2018). "Kajian Dampak Pariwisata Terhadap Perekonomian Indonesia". Universitas Indonesia. Jakarta.

<https://jateng.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

JL. Pahlawan No. 6 Semarang 50241

Telp. (024) 8412804, 8412805, Fax 8311195

Homepage : <https://jateng.bps.go.id> E-mail : jateng@bps.go.id